



LAPORAN KEUANGAN TA 2025 UNAUDITED

KPKNL BANDUNG

Gedung N Gedung Keuangan Negara Bandung
Jalan Asia Afrika No. 114
Bandung

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandung adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 09 Februari 2026
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bandung



Ditandatangani secara elektronik

Andy Pardede

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	5
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	6
A. PENJELASAN UMUM.....	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN..	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	30
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	51
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS...	58
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	60
LAMPIRAN	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
GEDUNG N GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NO. 114 BANDUNG, KOTAK POS 40261
TELEPON: (022) 4216161; FAKSIMILE: (022) 4263131; SUREL: KPKNL.BNDG@KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2025 Unudited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2025 Unudited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 09 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Andy Pardede



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung Tahun 2025 Unaudited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp37.124.346.856,00 atau mencapai 109,04% dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp34.047.456.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.008.793.115,00 atau mencapai 88,80% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.388.368.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.076.605.217,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.148.896.222,00, Aset Tetap sebesar Rp21.915.082.895,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp12.626.100,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.812.302.540,00 dan Rp22.264.302.677,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.233.205.879,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.416.473.208,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp33.816.732.671,00, Kegiatan Non-Operasional senilai Rp5.229.600,00, Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan defisit sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp33.821.962.271,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp22.461.582.031,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp33.821.962.271,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp34.019.241.625,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp22.264.302.677,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	34.047.456.000,00	37.124.346.856,00	109,04	34.957.773.990,00
Jumlah Pendapatan		34.047.456.000,00	37.124.346.856,00	109,04	34.957.773.990,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.4	3.342.752.000,00	2.975.493.115,00	89,01	2.976.073.710,00
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		3.342.752.000,00	2.975.493.115,00	89,01	2.976.073.710,00
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	45.616.000,00	33.300.000,00	73,00	2.257.005.089,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		45.616.000,00	33.300.000,00	73,00	2.257.005.089,00
Jumlah Belanja		3.388.368.000,00	3.008.793.115,00	88,80	5.233.078.799,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

Neraca
Per 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	27.552.650,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.810.122.020,00	1.068.066.835,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	194.068.889,00	52.427.616,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	144.705.313,00	63.745.071,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		4.148.896.222,00	1.211.792.172,00
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.19	16.691.230.000,00	16.691.230.000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	4.739.505.738,00	5.284.030.872,00
Gedung dan Bangunan	C.21	5.953.774.989,00	6.026.848.989,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	8.900.000,00	8.900.000,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(5.478.327.832,00)	(5.690.951.501,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		21.915.082.895,00	22.320.058.360,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	207.265.078,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(194.638.978,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		12.626.100,00	0,00
JUMLAH ASET		26.076.605.217,00	23.531.850.532,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	3.812.302.540,00	1.053.073.876,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	17.194.625,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.812.302.540,00	1.070.268.501,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.812.302.540,00	1.070.268.501,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.41	22.264.302.677,00	22.461.582.031,00
JUMLAH EKUITAS		22.264.302.677,00	22.461.582.031,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.076.605.217,00	23.531.850.532,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	37.233.205.879,00	34.971.033.535,00
Jumlah Pendapatan		37.233.205.879,00	34.971.033.535,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	145.222.736,00	205.213.183,00
Beban Barang & Jasa	D.4	1.093.592.207,00	1.087.090.362,00
Beban Pemeliharaan	D.5	461.890.174,00	505.204.674,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.195.543.026,00	1.121.038.362,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	520.225.065,00	491.307.129,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
Jumlah Beban		3.416.473.208,00	3.409.853.710,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		33.816.732.671,00	31.561.179.825,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	5.229.600,00	55.777.000,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		5.229.600,00	55.777.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		33.821.962.271,00	31.616.956.825,00
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		33.821.962.271,00	31.616.956.825,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	22.461.582.031,00	20.548.495.397,00
Surplus/Defisit LO	E.2	33.821.962.271,00	31.616.956.825,00
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Lain-lain			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E.8	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain		0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.9	(34.019.241.625,00)	(29.703.870.191,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	(197.279.354,00)	1.913.086.634,00
Ekuitas Akhir		22.264.302.677,00	22.461.582.031,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar
Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi AkruaL Pada Laporan Keuangan.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2024-2029 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2024-2029, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan DJKN yaitu :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.
Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.
Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara. Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan **program**: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh DJKN untuk mendapatkan suatu hasil.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung adalah 1 entitas.

Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	09	KPKNL Bandung	-	1	-	-	1

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Bea Lelang Atas Permintaan lelang dari Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat berkas permohonan lelang dinyatakan lengkap oleh Pejabat Lelang dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAP 425782) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Pendapatan diakui pada saat lelang telah selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah ditunjuk oleh Pejabat Lelang;
 - Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
 - Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782. Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang);
 - Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil (setoran SSBP menggunakan MAP 425699). Pendapatan diakui 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke Kas Negara;
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 425699). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara. Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;

- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAP 425784). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi;
- Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425995). Pendapatan diakui setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui koran dan telah disetor ke Kas Negara;
- Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 425995). Pendapatan diakui saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara;
- Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui ketika sudah terbitnya SK dan sudah disetor ke Kas Negara;
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10) Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk kedalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja

Selama periode berjalan satker KPKNL Bandung telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pagu awal sebesar Rp3.431.341.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp3.388.368.000,00, sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja	3.431.341.000,00	3.388.368.000,00
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3.385.025.000,00	3.342.752.000,00
Belanja Modal	46.316.000,00	45.616.000,00

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pada pagu belanja barang dan belanja modal dikarenakan adanya program efisiensi anggaran pemerintah pusat.

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp37.124.346.856,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp37.124.346.856,00 atau mencapai 109,04% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp34.047.456.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah KPKNL Bandung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	0,00	5.229.600,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	500.000,00	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	34.047.456.000,00	37.122.715.025,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	17.831.091,00	0,00
Jumlah Kotor	34.047.456.000,00	37.146.275.716,00	109,10
Pengembalian	0,00	21.928.860,00	0,00
Jumlah Bersih	34.047.456.000,00	37.124.346.856,00	109,04

Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.124.346.856,00 atau 6,20% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.957.773.990,00.

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	5.229.600,00	56.263.000,00	(51.033.400,00)	90,71
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000,00	0,00	500.000,00	100
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	37.100.786.165,00	34.891.418.728,00	2.209.367.437,00	6,33
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	17.831.091,00	10.092.262,00	7.738.829,00	76,68
Jumlah	34.124.346.856,00	34.957.773.990,00	2.166.572.866,00	6,20

B.2. Belanja

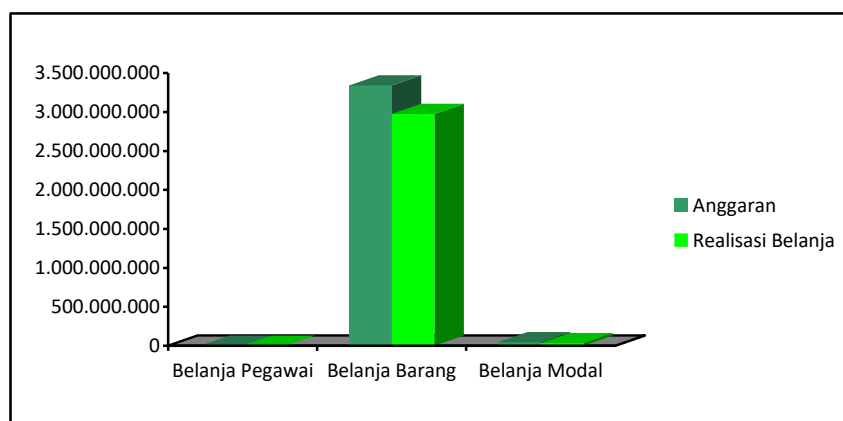
Realisasi Belanja Negara
Rp3.008.793.115,00

Realisasi belanja KPKNL Bandung pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.008.793.115,00 atau sebesar 88,80% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Anggaran belanja KPKNL Bandung Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.388.368.000,00.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	3.342.752.000,00	2.975.493.115,00	89,01
53	Belanja Modal	45.616.000,00	33.300.000,00	73,00
	Total Belanja Kotor	3.388.368.000,00	3.008.793.115,00	88,80
	Pengembalian	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Netto	3.388.368.000,00	5.233.078.799,00	88,80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.223.705.089,00 dibandingkan periode Tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan pada Tahun 2025 satker KPKNL Bandung tidak ada belanja modal berupa renovasi rumah negara dan pembelian 1 kendaraan roda empat seperti pada Tahun 2024.

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		2025	2024	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	2.975.493.115,00	2.976.073.710,00	(580.595,00)	0,02
53	Belanja Modal	33.300.000,00	2.257.005.089,00	(2.223.705.089,00)	98,52
	Jumlah	3.008.793.115,00	5.233.078.799,00	(2.224.285.684,00)	42,50

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp0,00*

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pagu dan realisasi belanja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung pada periode laporan tidak tersedia mengingat belanja pegawai sudah dilakukan secara terpusat di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp2.975.493.115,0
0

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.975.493.115,00 dan Rp2.976.073.710,00. Realisasi belanja barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

Rincian Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Operasional	1.014.262.077,00	894.622.960,00	119.639.117,00	13,37
Belanja Barang Non Operasional	72.413.610,00	141.820.475,00	(69.406.865,00)	48,94
Belanja Barang Persediaan	226.182.978,00	261.029.754,00	(34.846.776,00)	13,35
Belanja Jasa	5.201.250,00	52.357.485,00	(47.156.235,00)	90,07
Belanja Pemeliharaan	461.890.174,00	505.204.674,00	(43.314.500,00)	8,57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.195.543.026	1.121.038.362,00	74.504.664,00	6,65
Total Belanja Barang Kotor	2.975.493.115,00	2.976.073.710,00	(580.595,00)	0,02
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Barang Bersih	2.975.493.115,00	2.976.073.710,00	(580.595,00)	0,02

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp33.300.000,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.300.000,00 dan Rp2.257.005.089,00. Realisasi belanja modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 98,52% bila dibandingkan dengan Tahun 2024, hal ini disebabkan karena Tahun 2025 satker KPKNL Bandung tidak ada pelaksanaan kegiatan renovasi rumah negara dan pengadaan peralatan dan mesin seperti Tahun 2024.

Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	844.091.660,00	(810.791.650,00)	96,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.412.913.439,00	(1.412.913.439,00)	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	33.300.000,00	2.257.005.089,00	(2.223.705.089,00)	98,52
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	33.300.000,00	2.257.005.089,00	(2.223.705.089,00)	98,52

B.6. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembuatan Setipikat Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp33.300.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.300.000,00 dan Rp844.091.650,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 96,06% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024.

Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	844.091.650,00	(810.791.650,00)	96,05
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	33.300.000,00	844.091.650,00	(810.791.650,00)	96,05
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	33.300.000,00	844.091.650,00	(810.791.650,00)	96,05

B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.412.913.139,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibanding Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 karena tidak ada belanja modal yang dianggarkan.

Penurunan realiasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	1.412.913.439,00	1.412.913.439,00	100,00
Total Belanja Modal Kotor	0,00	1.412.913.439,00	(1.412.913.439,00)	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	0,00	1.412.913.439,00	(1.412.913.439,00)	100,00

B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

B.10. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

B.11. Belanja Modal BLU

Belanja Modal
BLU Rp0,00

Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Realisasi belanja modal BLU Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET LANCAR

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.148.896.222,00 dan Rp1.211.792.172,00.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.552.650,00	(27.552.650,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	3.810.122.020,00	1.068.066.835,00	2.742.055.185,00
Kas pada BLU	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0,00	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (Prepayment)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	194.068.889,00	52.427.616,00	141.641.273,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	0,00	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)	0,00	0,00	0,00
Persediaan	144.705.313,00	63.745.071,00	80.960.242,00
Persediaan yang belum deregister	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.148.896.222,00	1.211.792.172,00	2.937.104.050,00

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Saldo Rekening	0,00	0,00
Uang Tunai	0,00	0,00
Uang Muka di KPPN	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP Tahun 2025 masih dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Uang persediaan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas perkantoran.

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp27.552.650,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024
Bank ... No. acc ... (terlampir)	0,00	0,00
Uang Tunai	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sudah disetor ke Kas Negara pada bulan Desember 2025.

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp3.810.122.020,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Bandung berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta pajak pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp3.810.122.020,00 dan Rp1.068.066.835,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024
Utang Kepada Pihak Ketiga – BLU	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Dana Pihak Ketiga	3.810.122.020,00	1.068.066.835,00
Dana Pihak Ketiga Lainnya – BLU	0,00	0,00
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor Ke Kas Negara	0,00	0,00
Jumlah	3.810.122.020,00	1.068.066.835,00

Kas lainnya dan setara kas yang berasal dari utang kepada pihak ketiga lainnya dan utang pajak bendahara penerimaan/pengeluaran telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada bulan Desember 2025, sedangkan untuk dana pihak ketiga merupakan Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan/Ditransfer ke Pihak yang Berhak terdiri atas Hasil Bersih Lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan, Uang Jaminan Lelang dan Biaya E-Materai serta Angsuran Piutang Negara tetapi tidak ada konfirmasi dari debitur karena nama penyetor yang tercantum pada transaksi tidak ditemukan pada FocusPN.

C.6. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar dimuka
Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, berupa sewa gedung/gudang untuk tempat penyimpanan barang jaminan pada beberapa satuan kerja DJKN.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Pembayaran Internet	0,00	0,00
Pembayaran Sewa Gudang	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.7. Uang Muka Belanja (Prepayment)

Uang Muka Belanja
(Prepayment) Rp0,00

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan uang muka pembayaran gaji (persekot gaji) yang belum dikembalikan ke Kas Negara. Rincian sumber Uang Muka Belanja (Prepayment) pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024
Uang Muka Belanja Pegawai (Persekot Gaji)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp194.068.889,00

Pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima menyajikan pendapatan yang telah menjadi hak Entitas yang tidak memerlukan penagihan ataupun belum dilakukan penagihan. Posisi Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp194.068.889,00 dan Rp52.427.616,00.

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima terdiri atas kinerja lelang yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2025 namun sampai dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya, dihitung berdasarkan nilai penetapan bea lelang oleh Pejabat Lelang yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Uraian	2025	2024
Piutang PNB	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertahiran piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	2025	2024
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.12. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bagian
Lancar TP/TGR
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.15. Persediaan

Persediaan

Rp144.705.313,00

Nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp144.705.313,00 dan Rp63.745.071,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Barang Konsumsi	144.705.313,00	63.745.071,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	144.705.313,00	63.745.071,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

C.16. Persediaan Belum Diregister

Persediaan Belum

Diregister

Rp0,00

Nilai Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Persediaan belum diregister merupakan barang persediaan yang diperoleh dengan menggunakan akun persediaan namun belum dilakukan pendetilan pada modul persediaan pada tanggal akhir pelaporan:

Semua pembelian barang persediaan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 semuanya sudah dilakukan pencatatan/pendetilan pada modul persediaan pada bulan Desember 2024.

C.17. Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Nilai Tagihan Piutang TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025	2024
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
TP/TGR
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50	-
Kurang Lancar	-	10,00	-
Diragukan	-	50,00	-
Macet	-	100,00	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

ASET TETAP

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp21,915,082,895 dan Rp22.320.058.360,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis	2025	2024
Tanah	16.691.230.000,00	16.691.230.000,00
Peralatan dan Mesin	4.739.505.738,00	5.284.030.872,00
Gedung dan Bangunan	5.953.774.989,00	6.026.848.989,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	27.393.410.727,00	28.011.009.861,00
Akumulasi Penyusutan	(5.478.327.832,00)	(5.690.951.501,00)
Nilai Buku Aset Tetap	21.915.082.895,00	22.320.058.360,00

C.19. Tanah

Tanah

Rp16.691.230.000,00

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.691.230.000,00 dan Rp16.691.230.000,00.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	16.691.230.000,00
Mutasi Tambah	
100 Koreksi Saldo Awal	0,00
Mutasi Kurang	
302 Transfer Keluar	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	16.691.230.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa tanah.

Tidak ada realisasi belanja modal tanah dan mutasi aset Tahun 2025 yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.20. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp4.739.505.738,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4.739.505.738,00 dan Rp5.284.030.872,00. Sedangkan nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp3.967.778.227.

Mutasi nilai Aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	16.691.230.000,00
Mutasi Tambah	
100 Pembelian	79.200.000,00
102 Transfer Masuk	94.575.700,00
107 Reklasifikasi Masuk	0,00
402 Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	0,00
Mutasi Kurang	
302 Transfer Keluar	0,00
304 Reklasifikasi Keluar	0,00
305 Koreksi Pencatatan	0,00
401 Penghentian Aset dari Penggunaan	718.300.834,00
911 Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	0,00
Belum Teridentifikasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	16.691.230.000,00

Realisasi belanja modal Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp33.300.000,00. Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut tidak terdapat selisih dengan nilai mutasi aset/BMN dari pembelian & pengembangan nilai aset/BMN peralatan dan mesin sebesar Rp0,00.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

a. Transaksi penambahan dari Pembelian

No.	Uraian	Vol.	Total Harga
1	Peralatan Fasilitas Perkantoran	16	79.200.000,00
	Jumlah	16	79.200.000,00

b. Transaksi penambahan dari Transfer masuk

No.	Uraian	Vol.	Total Harga
1	Laptop	8	94.575.700,00
	Jumlah	8	94.575.700,00

c. Transaksi pengurangan dari penghentian aset dari penggunaan

No.	Uraian	Vol.	Total Harga
1	Peralatan Fasilitas Perkantoran	116	718.300.834,00
	Jumlah	116	718.300.834,00

C.21. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp5.953.774.989,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.953.774.989,00 dan Rp6.026.848.989,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.510.549.605,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	6.026.848.989,00
Mutasi Tambah	
105 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0,00
107 Reklasifikasi Masuk	0,00
Mutasi Kurang	
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
304 Reklasifikasi Keluar	73.074.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	5.953.774.989,00

Realisasi belanja modal Aset gedung dan bangunan Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Nilai realisasi belanja modal Gedung dan bangunan tersebut tidak terdapat selisih dengan nilai mutasi aset/BMN dari pembelian, pengembangan nilai & penyelesaian pembangunan langsung aset/BMN gedung dan bangunan.

C.22. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi Tambah	
100 Penambahan Saldo Awal	0,00
Mutasi Kurang	
304 Reklasifikasi Keluar	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

Pada Tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan tidak ada mutasi tambah aset yang berasal dari pembelian/ pengembangan nilai aset.

C.23. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp8.900.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.900.000,00 dan Rp8.900.000,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp8.900.000,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	8.900.000,00
Mutasi Tambah	
102 Transfer Masuk	0,00
Mutasi Kurang	
401 Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	8.900.000,00

Realisasi belanja modal lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Nilai realisasi belanja modal lainnya tersebut tidak terdapat selisih dengan nilai mutasi aset/BMN dari pembelian & pengembangan nilai aset/BMN aset tetap lainnya.

C.24. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.25. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.478.327.832,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp5.478.327.832,00 dan Rp5.690.951.501,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	16.691.230.000,00	0,00	16.691.230.000,00
Peralatan & Mesin	4.739.505.738,00	(3.967.778.227,00)	771.727.511,00
Gedung & Bangunan	5.953.774.989,00	(1.510.549.605,00)	4.443.225.384,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
Aset Tetap yang belum Diregister	0,00	0,00	0,00
Jumlah	27.393.410.727,00	(5.478.327.832,00)	21.915.082.895,00

C.26. Aset Tetap yang Belum Diregister

Aset tetap yang Belum
Diregister
Rp0,00

Nilai Aset tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang belum diregister merupakan barang aset yang diperoleh dengan menggunakan akun belanja modal namun belum dilakukan pendetilan pada modul aset tetap pada tanggal akhir pelaporan dan penerimaan hibah langsung yang belum diterbitkan MPHL nya, terdiri dari:

No.	Uraian	2025	2024
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Seluruh belanja yang menggunakan akun belanja modal per 31 Desember 2025 seluruhnya telah dilakukan pendetilan pada modul aset tetapnya sehingga tidak terdapat aset tetap belum diregister.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp0,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp0,00.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Uraian	2025	2024
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00

C.27. Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung berupa software, lisensi dan hasil kajian yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi Tambah	
101 Pembelian	0,00
208 Pengembangan Melalui KDP	0,00
Mutasi Kurang	
401 Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Software	0,00
2	Lisensi	0,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	0,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang untuk aset tak berwujud selama Tahun 2025.

C.27. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi
penggunaannya
Rp0,00

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

C.27. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Dana Kelolaan BLU
Rp0,00

Saldo Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

C.28. Dana Jangka Panjang

Dana Jangka Panjang
Rp0,00

Saldo Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00 ,00.

C.29. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp207.265.078,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp207.265.078,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi Tambah	
Penambahan Nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	Rp207.265.078,00
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0,00
177 Reklas dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	0,00
391 Penghapusan (BMN yang Dihentikan)	0,00
392 Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan)	0,00
396 Usulan Barang Rusak Ke Pengelola	0,00
402 Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	0,00
911 Pencatatan Barang Mau Dihapuskan	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp207.265.078,00

Nilai aset lain-lain setelah dilakukan rekonsiliasi antara modul GLP Rp207.265.078,00 dengan modul aset tetap Rp207.265.078,00 sehingga tidak terdapat selisih.

C.29. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp194.638.978,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp194.638.978,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp3.812.302.540,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp3.812.302.540,00 dan Rp1.070.268.501,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel berikut:

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	2025	2024
Utang kepada Pihak Ketiga	3.812.302.540,00	1.053.073.876,00
Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	17.194.625,00
JUMLAH	3.812.302.540,00	1.070.268.501,00

C.30. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3.812.302.540,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.812.302.540,00 dan Rp1.053.073.876,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai yang Belum Dibayar	0,00
Belanja Barang yang Belum Dibayar	0,00
Belanja Modal yang Belum Dibayar	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga – BLU	0,00
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
Dana Pihak Ketiga	3.812.302.540,00
Dana Pihak Ketiga - Lainnya	0,00
JUMLAH	3.812.302.540,00

C.31. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum
ditagihkan
Rp0,00

Jumlah Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kuitansi/SPM GUP seluruhnya telah diterbitkan SP2D.

Rincian Utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	0,00
JUMLAH	0,00

C.32. Hibah yang belum disahkan

Hibah yang belum
disahkan
Rp0,00

Jumlah Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Hibah Langsung yang belum disahkan	0,00
JUMLAH	0,00

C.33. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp0,00

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	0,00
JUMLAH	0,00

C.34. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan atas sewa lahan yang dimiliki oleh DJKN diantaranya berupa sewa aset BLU, sewa lahan untuk ruang ATM & kantin yang jangka waktu kontraknya belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Pendapatan Diterima Di Muka dari Pihak Ketiga	0,00
JUMLAH	0,00

C.35. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN disajikan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Uang Muka dari KPPN	0,00
JUMLAH	0,00

C.35. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp,00, dan Rp17.194.625,00. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0,00
Utang Pajak Bendhara Penerimaan yang Belum Disetor	0,00
JUMLAH	0,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Panjang tersaji pada Tabel berikut:

Uraian	2025	2024
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

C.37. Ekuitas

Ekuitas Rp22.264.302.677,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp22.264.302.677,00 dan Rp22.461.582.031,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPN Rp37.124.346.856,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.124.346.856,00 dan Rp34.957.773.990,00.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha dan	5.229.600,00	56.263.000,00	(51.033.400,00)	(90,70)
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000,00	0,00	500.000,00	100
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	37.100.786.165,00	34.891.418,728	2.209.367.437	6,33
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	17.831.091,00	10.092.262,00	7.738.829,00	76,68
Total	37.124.346.856,00	34.957.773.990,00	2.166.572.866,00	6,20

- Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan
- Pendapatan jasa lainnya merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan jasa lainnya
- Pendapatan Bunga, pengelolaan rekening dan pengelolaan keuangan merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan bea lelang PL 1, pendapatan bea lelang pegadaian, pendapatan biad PPN
- Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan anggaran lain-lain.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak terdapat beban pegawai karena pembayaran belanja pegawai untuk saat ini sudah dilakukan sentralisasi pembayarannya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp145.222.736,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.222.736,00 dan Rp205.213.183,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	145.222.736,00	205.213.183,00	(59.990.447,00)	29,23
Beban Pita Cukai, Meterai, dan Leges	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan untuk tujuan strategis	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.222.736,00	205.213.183,00	(59.990.447,00)	29,23

D.4. Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa
Rp1.093.592.207,00

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.093.592.207,00 dan Rp1.087.090.362,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	795.695.195,00	758.514.115,00	37.181.080,00	4,90
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26.889.381,00	13.334.011,00	13.555.370,00	101,66
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	31.036.421,00	19.941.125,00	11.095.296,00	55,64
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123.260.000,00	101.730.000,00	21.530.000,00	21,16
Beban Barang Operasional Lainnya	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	100,00
Beban Bahan	24.507.360,00	88.669.475,00	(64.162.115,00)	(72,36)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	47.906.250,00	53.151.000,00	(5.244.750,00)	(9,87)
Beban Langganan Listrik	0,00	22.481.919,00	(22.481.919,00)	(100,00)
Beban Langganan Telepon	0,00	4.430.917,00	(4.430.917,00)	(100,00)
Beban Langganan Air	5.097.600,00	3.782.300,00	1.315.300,00	34,77
Beban Sewa	0,00	11.155.500,00	(11.155.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Profesi	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Total	1.093.592.207,00	1.087.090.362,00	6.501.845,00	0,60

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp461.890.174,00

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp461.890.174,00 dan Rp505.204.674,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	154.062.100,00	(154.062.100,00)	100
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	216.092.543,00	83.384.366,00	132.708.177,00	159,15
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245.797.631,00	267.758.208,00	(21.960.577,00)	8,20
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	461.890.174,00	505.204.674,00	(43.314.500,00)	8,57

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.195.543.026,00

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.121.038.362,00 dan Rp714.131.537,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.042.757.026,00	929.373.362,00	113.383.664,00	12,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.786.000,00	191.665.000,00	(38.879.000,00)	20,29
Total	1.195.543.026,00	1.121.038.362,00	(38.879.000,00)	6,65

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp516.016.365,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp516.016.365,00 dan Rp491.307.129,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	297.204.517,00	288.471.516,00	8.733.001,00	3,03
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	218.811.848,00	202.835.613,00	15.976.235,00	7,88
Total	516.016.365,00	491.307.129,00	24.709.236,00	5,03

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih pada untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi atas pembayaran angsuran/setoran piutang/TGR.

Rincian Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban penyisihan piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban penyisihan piutang tidak tertagih - bagian lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban penyisihan piutang BLU penyedia barang dan jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

D.9. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain
Rp0,00

Jumlah Beban Lain-Lain untuk untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Lain-lain untuk untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

D.10. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp5.229.600,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset	5.229.600,00	55.777.000,00	(50.547.400,00)	90,62
Total	5.229.600,00	55.777.000,00	(50.547.400,00)	

D.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp22.461.582.031,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.461.582.031,00 dan Rp20.548.495.397,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO
Rp33.821.962.271,00

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar surplus Rp33.821.962.271,00 dan Rp31.616.956.825,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas nilai BMN yang dilakukan oleh Tim Revaluasi Aset/BMN yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Tahun 2018 tidak dilakukan revaluasi BMN sehingga selisih revaluasi aset BMN untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp0,00

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas/nilai aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan nilai aset non revaluasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.6. Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban
Rp0,00

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.7. Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas
Pendapatan Rp0,00

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

E.8. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain
Rp0,00

Koreksi lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.9. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas
(Rp34.019.241.625,00)

Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp34.019.241.625,00) dan (Rp29.703.870.191,00).

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.008.793.115,00	5.233.078.799,00	(2.224.285.684,00)	42,50
Diterima dari Entitas Lain	(37.124.346.856,00)	(34.957.773.990,00)	(2.166.572.866,00)	6,20
Transfer Keluar	1.736.416,00	0,00	1.736.416,00	100
Transfer Masuk	94.575.700,00	20.825.000,00	73.750.700,00	354,14
Total	(34.019.241.625,00)	(29.703.870.191,00)	(4.315.371.434,00)	14,53

E.10. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan
Ekuitas
(Rp197.279.354,00)

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp197.279.354,00) Rp1.913.086.634,00.

Uraian	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Surplus/Defisit LO	33.821.962.271,00	31.616.956.825,00	2.205.005.446,00	6,97
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	(34.019.241.625,00)	(29.703.870.191,00)	(4.315.371.434,00)	14,53
Total	(197.279.354,00)	1.913.086.634,00	(4.315.371.434,00)	110,31

E.11. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp22.264.302.677,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.264.302.677,00 dan Rp22.461.582.031,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain dalam laporan keuangan ini.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Rekonsiliasi SAKTI – SPAN Periode 2025-12
2. Laporan Operasional Per 31 Desember 2025
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025
4. Laporan Realisasi Anggaran (Face) Per 31 Desember 2025
5. Neraca (Face) Per 31 Desember 2025
6. Neraca Percobaan (Saldo Awal) Per 1 Januari 2025
7. Neraca Percobaan (Basis Akrua) Per 31 Desember 2025
8. Neraca Percobaan (Basis Kas) Per 31 Desember 2025
9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Kelompok) Per 31 Desember 2025
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Kelompok) Per 31 Desember 2025
11. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember 2025
12. Laporan Barang Pengguna Intrakompatabel (Kelompok) Per 31 Desember 2025
13. Laporan Barang Pengguna Ekstrakompatabel (Kelompok) Per 31 Desember 2025
14. Laporan Barang Pengguna Intrakompatabel dan Ekstrakompatabel (Kelompok) Per 31 Desember 2025
15. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakompatabel (Kelompok) Per 31 Desember 2025
16. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakompatabel (Kelompok) Per 31 Desember 2025
17. Laporan Barang Milik Negara Di Neraca Per 31 Desember 2025
18. Laporan Barang Milik Negara Di Neraca (Saldo Awal) Per 1 Januari 2025
19. Laporan Mutasi Barang Persediaan Per 31 Desember 2025
20. Laporan Barang Persediaan Per 31 Desember 2025
21. Laporan Persediaan Di Neraca Per 31 Desember 2025
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025
23. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025
24. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025
25. Daftar Rincian Saldo Rekening Yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025
26. Laporan Posisi Saldo Kas Pada Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025
27. Memo Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
28. Memo Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar
29. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BANDUNG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 537738 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/02/26 2:47

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,388,368,000	3,388,368,000	0
2	Belanja	3,008,793,115	3,008,793,115	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	34,047,456,000	34,047,456,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	37,146,275,716	37,146,275,716	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-21,928,860	-21,928,860	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM
Tgl Cetak : 06/02/26 2:54 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	37,233,205,879	34,971,033,535	2,262,172,344	6.469
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	37,233,205,879	34,971,033,535	2,262,172,344	6.469
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	37,233,205,879	34,971,033,535	2,262,172,344	6.469
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	145,222,736	205,213,183	(59,990,447)	(29.233)
Beban Barang dan Jasa	1,093,592,207	1,087,090,362	6,501,845	0.598
Beban Pemeliharaan	461,890,174	505,204,674	(43,314,500)	(8.574)
Beban Perjalanan Dinas	1,195,543,026	1,121,038,362	74,504,664	6.646
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:54 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	520,225,065	491,307,129	28,917,936	5.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,416,473,208	3,409,853,710	6,619,498	0.194
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	33,816,732,671	31,561,179,825	2,255,552,846	7.147
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	5,229,600	55,777,000	(50,547,400)	(90.624)
Pendapatan Pelepasan Aset	5,229,600	55,777,000	(50,547,400)	(90.624)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,229,600	55,777,000	(50,547,400)	(90.624)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	33,821,962,271	31,616,956,825	2,205,005,446	6.974
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	33,821,962,271	31,616,956,825	2,205,005,446	6.974

Keterangan :

FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ANDY PARDEDE

NIP 196901121995011001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:54 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,461,582,031	20,548,495,397	1,913,086,634	9.31
SURPLUS/DEFISIT-LO	33,821,962,271	31,616,956,825	2,205,005,446	6.97
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(34,019,241,625)	(29,703,870,191)	(4,315,371,434)	14.53
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(197,279,354)	1,913,086,634	(2,110,365,988)	(110.31)
EKUITAS AKHIR	22,264,302,677	22,461,582,031	(197,279,354)	(0.88)

Keterangan :

FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ANDY PARDEDE

NIP 196901121995011001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG 537738

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM
Tgl Cetak : 06/02/26 2:54 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	34,047,456,000	37,124,346,856	3,076,890,856	109.04	28,561,910,000	34,957,773,990	6,395,863,990	122.39
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	34,047,456,000	37,124,346,856	3,076,890,856	109.04	28,561,910,000	34,957,773,990	6,395,863,990	122.39
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	34,047,456,000	37,124,346,856	3,076,890,856	109.04	28,561,910,000	34,957,773,990	6,395,863,990	122.39
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,388,368,000	3,008,793,115	(379,574,885)	88.80	5,600,413,000	5,233,078,799	(367,334,201)	93.44
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	3,342,752,000	2,975,493,115	(367,258,885)	89.01	3,316,940,000	2,976,073,710	(340,866,290)	89.72
3. Belanja Modal	45,616,000	33,300,000	(12,316,000)	73.00	2,283,473,000	2,257,005,089	(26,467,911)	98.84
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG 537738

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM
Tgl Cetak : 06/02/26 2:54 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,388,368,000	3,008,793,115	(379,574,885)	88.80	5,600,413,000	5,233,078,799	(367,334,201)	93.44
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
ANDY PARDEDE
NIP 196901121995011001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM
Tgl Cetak : 06/02/26 2:55 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	27,552,650	(27,552,650)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,810,122,020	1,068,066,835	2,742,055,185	256.73
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	194,068,889	52,427,616	141,641,273	270.17
Persediaan	144,705,313	63,745,071	80,960,242	127.01
JUMLAH ASET LANCAR	4,148,896,222	1,211,792,172	2,937,104,050	242.38
ASET TETAP				
Tanah	16,691,230,000	16,691,230,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,739,505,738	5,284,030,872	(544,525,134)	(10.31)
Gedung dan Bangunan	5,953,774,989	6,026,848,989	(73,074,000)	(1.21)
Aset Tetap Lainnya	8,900,000	8,900,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,478,327,832)	(5,690,951,501)	212,623,669	(3.74)
JUMLAH ASET TETAP	21,915,082,895	22,320,058,360	(404,975,465)	(1.81)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	207,265,078	0	207,265,078	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(194,638,978)	0	(194,638,978)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	12,626,100	0	12,626,100	
JUMLAH ASET	26,076,605,217	23,531,850,532	2,544,754,685	10.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,812,302,540	1,053,073,876	2,759,228,664	262.02
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	17,194,625	(17,194,625)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,812,302,540	1,070,268,501	2,742,034,039	256.20
JUMLAH KEWAJIBAN	3,812,302,540	1,070,268,501	2,742,034,039	256.20
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,264,302,677	22,461,582,031	(197,279,354)	(0.88)
JUMLAH EKUITAS	22,264,302,677	22,461,582,031	(197,279,354)	(0.88)
JUMLAH EKUITAS	22,264,302,677	22,461,582,031	(197,279,354)	(0.88)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,076,605,217	23,531,850,532	2,544,754,685	10.81

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

**SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG**

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:55 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ANDY PARDEDE

NIP 196901121995011001



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 0200

SATUAN KERJA : 537738

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

JAWA BARAT

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl. Cetak 06/02/2026 3:03 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	27,552,650	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,068,066,835	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	52,427,616	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	63,745,071	0
0.0	131111	Tanah	16,691,230,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,284,030,872	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,026,848,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	8,900,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,340,754,544
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,350,196,957
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,201,666
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,050,872,210
0.0	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	0	17,194,625
0.0	391111	Ekuitas	0	22,461,582,031
JUMLAH			29,222,802,033	29,222,802,033

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:55 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3,810,122,020	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	194,068,889	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	144,705,313	0
0.0	131111	Tanah	16,691,230,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,739,505,738	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,953,774,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	8,900,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,967,778,227
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,510,549,605
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	207,265,078	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	194,638,978
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,180,520
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	3,810,122,020
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,008,793,115
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	37,124,346,856	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	1,736,416
0.0	313221	Transfer Masuk	0	94,575,700
0.0	391111	Ekuitas	0	22,461,582,031
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,229,600
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	33,449,642,889
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,602,938,491
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	162,293,408
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	17,831,091
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	795,695,195	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26,889,381	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,036,421	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123,260,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	39,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	24,507,360	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	47,906,250	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,097,600	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	216,092,543	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245,797,631	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,042,757,026	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	152,786,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	297,204,517	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	218,811,848	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 7:43 AM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:55 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,208,700	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	145,222,736	0
JUMLAH			72,290,392,091	72,290,392,091

Keterangan :

FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ANDY PARDEDE

NIP 196901121995011001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 06/02/26 2:55 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,008,793,115
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	37,124,346,856	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,229,600
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	33,335,554,266
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,624,867,351
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	162,293,408
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	17,831,091
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	795,695,195	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,889,381	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29,217,501	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,260,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	39,200,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	24,507,360	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	47,906,250	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	226,182,978	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	5,201,250	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	216,092,543	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245,797,631	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,042,757,026	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	152,786,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,300,000	0
3.1	425784	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	21,928,860	0
JUMLAH			40,155,068,831	40,155,068,831

Keterangan :

FINAL

KOTA BANDUNG, 6 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ANDY PARDEDE

NIP 196901121995011001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 537738
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/02/26 2:56 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/2/26 2:52 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	811,184,000	830,809,000	795,695,195	0	795,695,195	95.77	35,113,805
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,928,000	26,928,000	26,889,381	0	26,889,381	99.86	38,619
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45,136,000	49,316,000	29,217,501	0	29,217,501	59.25	20,098,499
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,360,000	144,360,000	123,260,000	0	123,260,000	85.38	21,100,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,027,608,000	1,090,613,000	1,014,262,077	0	1,014,262,077	93	76,350,923
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	87,315,000	80,665,000	24,507,360	0	24,507,360	30.38	56,157,640
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	61,945,000	61,968,000	47,906,250	0	47,906,250	77.31	14,061,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	149,260,000	142,633,000	72,413,610	0	72,413,610	50.77	70,219,390
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	306,672,000	327,767,000	226,182,978	0	226,182,978	69.01	101,584,022
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	306,672,000	327,767,000	226,182,978	0	226,182,978	69.01	101,584,022
5221	Belanja Jasa							
522113	Belanja Langganan Air	5,500,000	5,500,000	5,201,250	0	5,201,250	94.57	298,750
522151	Belanja Jasa Profesi	14,200,000	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	19,700,000	17,900,000	5,201,250	0	5,201,250	29.06	12,698,750
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	168,150,000	216,500,000	216,092,543	0	216,092,543	99.81	407,457
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	238,820,000	245,920,000	245,797,631	0	245,797,631	99.95	122,369
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	406,970,000	462,420,000	461,890,174	0	461,890,174	99.89	529,826
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,248,510,000	1,114,659,000	1,042,757,026	0	1,042,757,026	93.55	71,901,974
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	226,305,000	186,760,000	152,786,000	0	152,786,000	81.81	33,974,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,474,815,000	1,301,419,000	1,195,543,026	0	1,195,543,026	91.86	105,875,974
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,385,025,000	3,342,752,000	2,975,493,115	0	2,975,493,115	89.01	367,258,885
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 008 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/02/26 2:56 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/2/26 2:52 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	3,431,341,000	3,388,368,000	3,008,793,115	0	3,008,793,115	88.8	379,574,885

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 537738

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/02/26 3:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,229,600	0	5,229,600	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	5,229,600	0	5,229,600	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,000	0	500,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	30,336,867,000	33,335,554,266	0	33,335,554,266	109.88
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,679,200,000	3,624,867,351	21,928,860	3,602,938,491	97.93
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	31,389,000	162,293,408	0	162,293,408	517.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	34,047,456,000	37,122,715,025	21,928,860	37,100,786,165	108.97
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	17,831,091	0	17,831,091	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	17,831,091	0	17,831,091	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	34,047,456,000	37,146,275,716	21,928,860	37,124,346,856	109.04
	JUMLAH PENDAPATAN	34,047,456,000	37,146,275,716	21,928,860	37,124,346,856	109.04

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 537738
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/02/26 3:02 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/2/26 2:52 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	811,184,000	830,809,000	795,695,195	0	795,695,195	95.77	35,113,805
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,928,000	26,928,000	26,889,381	0	26,889,381	99.86	38,619
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45,136,000	49,316,000	29,217,501	0	29,217,501	59.25	20,098,499
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,360,000	144,360,000	123,260,000	0	123,260,000	85.38	21,100,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,027,608,000	1,090,613,000	1,014,262,077	0	1,014,262,077	93	76,350,923
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	87,315,000	80,665,000	24,507,360	0	24,507,360	30.38	56,157,640
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	61,945,000	61,968,000	47,906,250	0	47,906,250	77.31	14,061,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	149,260,000	142,633,000	72,413,610	0	72,413,610	50.77	70,219,390
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	306,672,000	327,767,000	226,182,978	0	226,182,978	69.01	101,584,022
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	306,672,000	327,767,000	226,182,978	0	226,182,978	69.01	101,584,022
5221	Belanja Jasa							
522113	Belanja Langganan Air	5,500,000	5,500,000	5,201,250	0	5,201,250	94.57	298,750
522151	Belanja Jasa Profesi	14,200,000	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	19,700,000	17,900,000	5,201,250	0	5,201,250	29.06	12,698,750
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	168,150,000	216,500,000	216,092,543	0	216,092,543	99.81	407,457
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	238,820,000	245,920,000	245,797,631	0	245,797,631	99.95	122,369
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	406,970,000	462,420,000	461,890,174	0	461,890,174	99.89	529,826
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,248,510,000	1,114,659,000	1,042,757,026	0	1,042,757,026	93.55	71,901,974
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	226,305,000	186,760,000	152,786,000	0	152,786,000	81.81	33,974,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,474,815,000	1,301,419,000	1,195,543,026	0	1,195,543,026	91.86	105,875,974
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,385,025,000	3,342,752,000	2,975,493,115	0	2,975,493,115	89.01	367,258,885
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	46,316,000	45,616,000	33,300,000	0	33,300,000	73	12,316,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 008 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/02/26 3:02 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/2/26 2:52 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	3,431,341,000	3,388,368,000	3,008,793,115	0	3,008,793,115	88.8	379,574,885

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 06/02/26 3:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		964	16,691,230,000	0	0	0	0	964	16,691,230,000
20101	TANAH PERSIL	-	964	16,691,230,000	0	0	0	0	964	16,691,230,000
132111	Peralatan dan Mesin		768	5,284,030,872	24	173,775,700	116	718,300,834	676	4,739,505,738
30103	ALAT BANTU	-	1	90,900,000	0	0	1	90,900,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,293,840,429	0	0	0	0	10	1,293,840,429
30303	ALAT UKUR	-	4	4,089,684	0	0	3	3,390,663	1	699,021
30501	ALAT KANTOR	-	242	1,293,488,174	10	33,300,000	12	34,908,299	240	1,291,879,875
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	392	1,481,635,716	6	45,900,000	70	232,044,591	328	1,295,491,125
30601	ALAT STUDIO	-	12	77,183,388	0	0	5	19,998,324	7	57,185,064
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	3,865,500	0	0	1	2,700,000	1	1,165,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	2,184,600	0	0	0	0	1	2,184,600
31001	KOMPUTER UNIT	-	68	778,271,860	8	94,575,700	21	287,637,146	55	585,210,414
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	36	258,571,521	0	0	3	46,721,811	33	211,849,710
133111	Gedung dan Bangunan		14	6,026,848,989	0	0	1	73,074,000	13	5,953,774,989
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,035,377,000	0	0	0	0	2	3,035,377,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	12	2,991,471,989	0	0	1	73,074,000	11	2,918,397,989
135121	Aset Tetap Lainnya		37	8,900,000	0	0	0	0	37	8,900,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	37	8,900,000	0	0	0	0	37	8,900,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	111	745,474,834	83	538,209,756	28	207,265,078
30103	ALAT BANTU	-	0	0	1	90,900,000	1	90,900,000	0	0
30303	ALAT UKUR	-	0	0	3	3,390,663	0	0	3	3,390,663
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	12	34,908,299	9	21,290,900	3	13,617,399
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	64	186,144,591	49	104,533,836	15	81,610,755
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	5	19,998,324	0	0	5	19,998,324
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	1	2,700,000	1	2,700,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	21	287,637,146	21	287,637,146	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	3	46,721,811	2	31,147,874	1	15,573,937
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	0	0	1	73,074,000	0	0	1	73,074,000
TOTAL				28,011,009,861		919,250,534		1,329,584,590		27,600,675,805

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 06/02/26 3:09 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL	
1	2	3	4	5	6		7		8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		41	22,333,616	0	0	6	1,650,000	35	20,683,616
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	35	20,468,000	0	0	6	1,650,000	29	18,818,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	1,865,616	0	0	0	0	6	1,865,616
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	6	1,650,000	6	1,650,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	6	1,650,000	6	1,650,000	0	0
TOTAL				22,333,616		1,650,000		3,300,000		20,683,616

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 06/02/26 3:09 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		964	16,691,230,000	0	0	0	0	964	16,691,230,000
20101	TANAH PERSIL	-	964	16,691,230,000	0	0	0	0	964	16,691,230,000
132111	Peralatan dan Mesin		809	5,306,364,488	24	173,775,700	122	719,950,834	711	4,760,189,354
30103	ALAT BANTU	-	1	90,900,000	0	0	1	90,900,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,293,840,429	0	0	0	0	10	1,293,840,429
30303	ALAT UKUR	-	4	4,089,684	0	0	3	3,390,663	1	699,021
30501	ALAT KANTOR	-	242	1,293,488,174	10	33,300,000	12	34,908,299	240	1,291,879,875
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	427	1,502,103,716	6	45,900,000	76	233,694,591	357	1,314,309,125
30601	ALAT STUDIO	-	12	77,183,388	0	0	5	19,998,324	7	57,185,064
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	3,865,500	0	0	1	2,700,000	1	1,165,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	2,184,600	0	0	0	0	1	2,184,600
31001	KOMPUTER UNIT	-	68	778,271,860	8	94,575,700	21	287,637,146	55	585,210,414
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	42	260,437,137	0	0	3	46,721,811	39	213,715,326
133111	Gedung dan Bangunan		14	6,026,848,989	0	0	1	73,074,000	13	5,953,774,989
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,035,377,000	0	0	0	0	2	3,035,377,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	12	2,991,471,989	0	0	1	73,074,000	11	2,918,397,989
135121	Aset Tetap Lainnya		37	8,900,000	0	0	0	0	37	8,900,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	37	8,900,000	0	0	0	0	37	8,900,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	117	747,124,834	89	539,859,756	28	207,265,078
30103	ALAT BANTU	-	0	0	1	90,900,000	1	90,900,000	0	0
30303	ALAT UKUR	-	0	0	3	3,390,663	0	0	3	3,390,663
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	12	34,908,299	9	21,290,900	3	13,617,399
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	70	187,794,591	55	106,183,836	15	81,610,755
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	5	19,998,324	0	0	5	19,998,324
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	1	2,700,000	1	2,700,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	21	287,637,146	21	287,637,146	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	3	46,721,811	2	31,147,874	1	15,573,937
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	0	0	1	73,074,000	0	0	1	73,074,000
TOTAL				28,033,343,477		920,900,534		1,332,884,590		27,621,359,421

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 06/02/26 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		964	16,691,230,000	0	0	0	16,691,230,000
20101	TANAH PERSIL	-	964	16,691,230,000	0	0	0	16,691,230,000
132111	Peralatan dan Mesin		676	4,739,505,738	(4,340,754,544)	372,976,317	(3,967,778,227)	771,727,511
30103	ALAT BANTU	-	0	0	(90,900,000)	90,900,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,293,840,429	(949,121,258)	(61,019,886)	(1,010,141,144)	283,699,285
30303	ALAT UKUR	-	1	699,021	(4,089,684)	3,390,663	(699,021)	0
30501	ALAT KANTOR	-	240	1,291,879,875	(1,207,821,074)	112,291	(1,207,708,783)	84,171,092
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	328	1,295,491,125	(1,087,877,464)	74,892,933	(1,012,984,531)	282,506,594
30601	ALAT STUDIO	-	7	57,185,064	(54,380,988)	12,541,324	(41,839,664)	15,345,400
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	1,165,500	(2,816,550)	2,466,900	(349,650)	815,850
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	2,184,600	(2,184,600)	0	(2,184,600)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	55	585,210,414	(699,266,235)	208,600,096	(490,666,139)	94,544,275
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	33	211,849,710	(242,296,691)	41,091,996	(201,204,695)	10,645,015
133111	Gedung dan Bangunan		13	5,953,774,989	(1,350,196,957)	(160,352,648)	(1,510,549,605)	4,443,225,384
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,035,377,000	(813,047,415)	(108,406,322)	(921,453,737)	2,113,923,263
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	11	2,918,397,989	(537,149,542)	(51,946,326)	(589,095,868)	2,329,302,121
135121	Aset Tetap Lainnya		37	8,900,000	0	0	0	8,900,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	37	8,900,000	0	0	0	8,900,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		28	207,265,078	0	(194,638,978)	(194,638,978)	12,626,100
30303	ALAT UKUR	-	3	3,390,663	0	(3,390,663)	(3,390,663)	0
30501	ALAT KANTOR	-	3	13,617,399	0	(13,617,399)	(13,617,399)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	15	81,610,755	0	(79,945,755)	(79,945,755)	1,665,000
30601	ALAT STUDIO	-	5	19,998,324	0	(19,998,324)	(19,998,324)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	15,573,937	0	(15,573,937)	(15,573,937)	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	73,074,000	0	(62,112,900)	(62,112,900)	10,961,100
JUMLAH			1,718	27,600,675,805	(5,690,951,501)	17,984,691	(5,672,966,810)	21,927,708,995

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 06/02/26 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		35	20,683,616	(18,758,606)	219,996	(18,538,610)	2,145,006
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	29	18,818,000	(18,059,000)	686,400	(17,372,600)	1,445,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	1,865,616	(699,606)	(466,404)	(1,166,010)	699,606
JUMLAH			35	20,683,616	(18,758,606)	219,996	(18,538,610)	2,145,006

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl.Data : 06/02/26 12:37 PM
Tgl.Cetak : 06/02/26 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	144,705,313
131111	Tanah	16,691,230,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,739,505,738
133111	Gedung dan Bangunan	5,953,774,989
135121	Aset Tetap Lainnya	8,900,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,967,778,227)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,510,549,605)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	207,265,078
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(194,638,978)
J U M L A H		22,072,414,308

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tanggal : 06/02/26 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	63,745,071
131111	Tanah	16,691,230,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,284,030,872
133111	Gedung dan Bangunan	6,026,848,989
135121	Aset Tetap Lainnya	8,900,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,340,754,544)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,350,196,957)
J U M L A H		22,383,803,431

**LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 537738 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**
 BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tanggal : 06/02/26 3:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_mutasi_satker_poc

Kode	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		NILAI
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	63,745,071	226,182,978	127,412,453	144,705,313
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	1,523,040	1,523,040	0
117131	Bahan Baku	0	1,523,040	1,523,040	0
JUMLAH		63,745,071	229,229,058	130,458,533	144,705,313

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537738 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tanggal : 06/02/26 3:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,463,830
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	163,500
1010301003	Penjepit Kertas	194,830
1010301004	Penghapus/Korektor	36,075
1010301005	Buku Tulis	1,225,000
1010301006	Ordner Dan Map	35,841,630
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	340,860
1010301010	Alat Perekat	852,380
1010301012	Staples	247,086
1010301013	Isi Staples	284,000
1010301014	Barang Cetakan	41,890,430
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,870,470
1010302001	Kertas HVS	12,562,425
1010302002	Berbagai Kertas	7,271,082
1010302004	Amplop	16,788,120
1010304001	Continuous Form	949,938
1010304003	Pita Printer	1,610,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	12,899,000
1010304009	Harddisk Internal	1,830,000
1010304010	Mouse	145,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	4,855,375
1010306010	Batu Baterai	384,282
Jumlah Barang Konsumsi		144,705,313
TOTAL		144,705,313

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 537738 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**
 BANDUNG

Tgl Data : 06/02/26 12:37 PM
Tanggal : 06/02/26 3:15 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_satker

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	144,705,313
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117131	Bahan Baku	0
JUMLAH		144,705,313

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
Satuan Kerja : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537738/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (022) Bandung I
Alamat dan No Telp : Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung , 0224216161 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 3.810.122.020,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	2.361.994.153,00	161.398.507.172,00	159.950.379.305,00	3.810.122.020,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.361.994.153,00	161.398.507.172,00	159.950.379.305,00	3.810.122.020,00
B.	BP Selain Kas	2.361.994.153,00	161.398.507.172,00	159.950.379.305,00	3.810.122.020,00
	1. BP PNB	0,00	5.244.126.642,00	5.244.126.642,00	0,00
	2. BP DPK	2.361.994.153,00	153.141.547.322,00	151.693.419.455,00	3.810.122.020,00
	3. BP Pajak	0,00	3.012.833.208,00	3.012.833.208,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	3.810.122.020,00
3.	Jumlah Kas	Rp	3.810.122.020,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	3.810.122.020,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	3.810.122.020,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	8.256.959.850,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	8.256.959.850,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	8.256.959.850,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	5.244.126.642,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	5.722.333.972,00
3. Selisih	Rp	- 478.207.330,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 478.207.330,00 karena Bea Permohonan dan Bea Lelang Pegadaian yang disetor ke Kas Negara tidak melalui Rekening Bendahara Penerimaan.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA BANDUNG , 15 Januari 2026
Bendahara Penerimaan

KARMAN
NIP 196801151991031001

ENI LATIFAH
NIP 199709052019022001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal, 15 Januari 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG

Satuan Kerja : (537738) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG

Alamat dan No Telp : Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung , 0224216161

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537738/2025

Tahun : 2025

KPPN : (022) Bandung I

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00208/DRPP/537738/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	373.001.474,00	149.187.658,00	522.189.132,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	373.001.474,00	149.187.658,00	522.189.132,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	373.001.474,00	19.935.523,00	392.936.997,00	0,00
	1. BP UP*)	22.246.137,00	19.935.523,00	42.181.660,00	0,00
	2. BP TUP*)	347.331.081,00	0,00	347.331.081,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	3.424.256,00	0,00	3.424.256,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA BANDUNG, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani Secara Elektronik

KARMAN

NIP 196801151991031001



Ditandatangani Secara Elektronik

RATNAWATI

NIP 197412212005012001

Dicetak pada tanggal 06 Januari 2026



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890145377381000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00208/DRPP/537738/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani Secara Elektronik

RATNAWATI
NIP 197412212005012001



Ditandatangani Secara Elektronik

KARMAN
NIP 196801151991031001

Dicetak pada tanggal,06 Januari 2026



***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 537738

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145377381000	BPG 022 KPKNL Bandung	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. - KC Pecenongan	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	8889994660	RPL 022 KPKNL BANDUNG UTK TUKIN	PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk. -BNI Cab. Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung	30	S-2140/WPB.13/KP.0104/2019	23-09-2019	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani Secara Elektronik

RATNAWATI

NIP 197412212005012001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Bandung I - 022

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG (537738)

Cetak Tanggal 06-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	7B31F2ME7E4RP597 017180643505	411618	IDR	654,054	ADA
2	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	BCC6A015NT2C3CN4 038416639925	411618	IDR	323,308	ADA
3	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	7DC7C0TJ98A9TM19 267062639802	411618	IDR	103,322	ADA
4	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	0F832015NQ6BAKO4 401709643510	411618	IDR	66,000	ADA
5	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	386065BMN15HJVKQ 461467639946	411618	IDR	118,918	ADA
6	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	B47DB3IRPOMP6A48 624850643639	411618	IDR	77,179	ADA
7	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	C1EAE3IRNFIIKQ60 838979639954	411618	IDR	141,625	ADA
8	020	119415	30-Des-25	RATNAWATI 3604046112740357	13C30015OC0FB2DQ 990605639805	411618	IDR	1,939,850	ADA

TOTAL	3,424,256	-
-------	-----------	---



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197412212005012001 pada 06-01-2026 12:12:53 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Bandung I - 022

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG (537738)

Cetak Tanggal 06-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	022	537738	23-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	930CD1GLGL9M643H 886802005902	815113	IDR	1,740	ADA
2	022	537738	30-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	65CE16R6FKQ3E1DL 251254435905	815511	IDR	24,601,519	ADA
3	022	537738	30-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	DDCC039GGAGHQH ND 548970766330	815111	IDR	2,046,637	ADA
4	022	537738	31-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	512EF5UOVQ80J68M 105345108744	815511	IDR	11,793,697	ADA
5	022	537738	31-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	9FC3F52BFVLK65V9 272283500685	815511	IDR	1,206,303	ADA
6	022	537738	31-Des-25	RATNAWATI 0000000000000000	4BD4B6R6FKQD0503 466848472465	815511	IDR	15,463,589	ADA

TOTAL	55,113,485	-
-------	------------	---



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197412212005012001 pada 06-01-2026 12:12:54 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG (537738)

Cetak Tanggal 06-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197412212005012001 pada 06-01-
2026 12:12:54 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG N LANTAI 1 DAN 2, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG, JAWA BARAT
40261;
TELEPON (022) 4216161; FAKSIMILE (022) 4263131; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Per 31 Desember 2025

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2025	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :		
	1. Biaya Administrasi	Rp	0,00
	2. Bea Lelang	Rp	0,00
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0,00
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp	0,00
	6. PPh	Rp	0,00
	Jumlah A	Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindah bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari :		
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0,00
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	251.924.299,00
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	720.600.000,00
	9. Lain-lain Lelang	Rp	2.836.097.721,00
	10. Lain-lain Piutang	Rp	1.500.000,00
	Jumlah B	Rp	3.810.122.020,00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	3.810.122.020,00

Bandung, 09 Januari 2026

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan (Sementara)



Ditandatangani secara elektronik
Karman



Ditandatangani secara elektronik
Migga Puteri Wardhani



MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : KPKNL Bandung
No Dokumen : 1/537738/2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Penetapan Lelang Desember 2025, HBL disetor di Januari 2026. (KK PYMHD: Rp194.068.889)

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Koreksi Antar Beban
☒ Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas di Bendahara Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	192.387.222	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		192.387.222
2	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.681.667	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		1.681.667

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Akir Priyono
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : KPKNL Bandung
No Dokumen : 2/537738/2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar: Pemakaian langganan air Desember 2025, tagihan Januari 2026 (KK BYMHD: Rp361.600)

Kategori Jurnal Penyesuaian

Pendapatan Diterima di Muka	Koreksi Antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Dibayar di Muka	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
v Belanja yang Masih Harus Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
Penghapusan Piutang	Transfer Masuk
Penyusutan Aset	Transfer Keluar
Kas di Bendahara Penerimaan	Reklasifikasi Neraca
Kas di Bendahara Pengeluaran	Koreksi
Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	361.600	
	K	212112	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		361.600

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Akir Priyono
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : KPKNL Bandung
No Dokumen : 3/537738/2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar: Langganan pengiriman Pos Desember 2025, tagihan Januari 2026 (KK BYMHD: Rp1.818.920)

Kategori Jurnal Penyesuaian

Pendapatan Diterima di Muka	Koreksi Antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Dibayar di Muka	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
v Belanja yang Masih Harus Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
Penghapusan Piutang	Transfer Masuk
Penyusutan Aset	Transfer Keluar
Kas di Bendahara Penerimaan	Reklasifikasi Neraca
Kas di Bendahara Pengeluaran	Koreksi
Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.818.920	
	K	212112	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		1.818.920

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Akir Priyono
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Andika Ramadani Ababil
Tanggal 31 Desember 2025



KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
 Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
 Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		√	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-	92.839.284	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-	92.839.284	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
 Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAHAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537738) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
 Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

<i>Objek Penelaahan</i>		Kondisi LK		Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN				
Tidak ada				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Ditandatangani secara elektronik Akir Priyono		Bandung, 9 Februari 2026 Penelaah,  Ditandatangani secara elektronik Andika Ramadani Ababil		

